

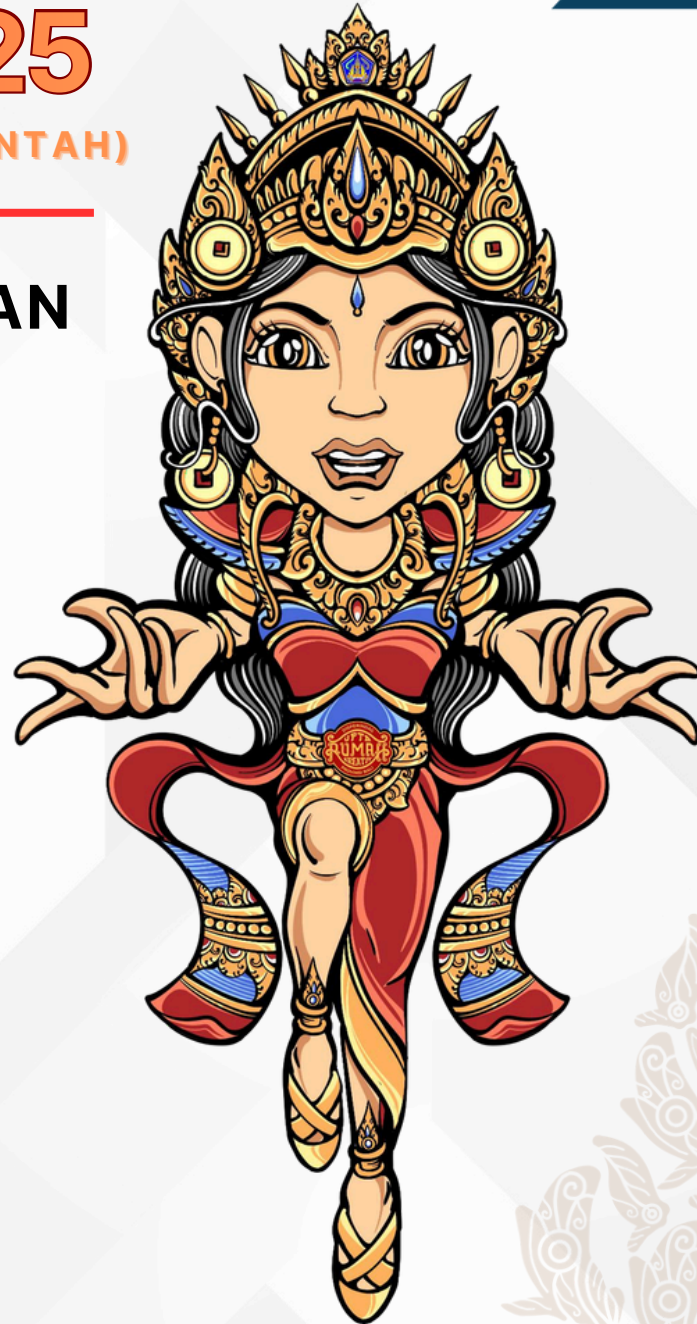






PEMERINTAH
PROVINSI BALI

LKjIP TAHUN 2025

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



-  disperindag.baliprov.go.id
-  @disperindag_bali
-  disperindag@baliprov.go.id
-  Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon



Bali Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan dijabarkan dalam Renstra. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Diharapkan penyajian LKJiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dimasa mendatang

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 199303 1 208



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tfe.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, dengan indikator kinerja: Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan target 9,05 % dengan realisasi 8,78%

Sasaran 2 : Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB dengan indikator kinerja: Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB target sebesar 6,10% realisasi sebesar 6,23%,

Selain pencapaian sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali juga ditunjukkan oleh pencapaian target Pelaksanaan Program Pendukung.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ke depan **Pertama**,



tantangan yang dihadapi dalam Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri antara lain masih berfluktuasi nya harga kebutuhan pokok, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen. **Kedua**, tantangan yang dihadapi dalam Meningkatnya Daya Saing Industri antara lain perlunya inovasi yang tinggi agar produk yang dikembangkan dapat bersaing, peningkatan kualitas SDM dalam teknik produksi, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam produksi dan pemasaran, memiliki merek (HKI), dan melakukan peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing dengan produk impor. **Ketiga**, tantangan yang dihadapi dalam Meningkatnya daya saing ekonomi lokal antara lain Kurangnya pemasaran produk lokal menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang masih mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi dan platform digital, minimnya pemahaman tentang strategi pemasaran yang efektif, serta kurangnya dukungan dalam hal promosi dan branding.

Selain itu, banyak produk lokal yang memiliki kualitas baik tetapi belum dikenal secara luas karena rendahnya eksposur di media sosial dan e-commerce. Persaingan dengan produk-produk dari luar daerah maupun impor juga semakin ketat, sehingga produk lokal sering kali kalah dalam hal daya tarik dan pemasaran.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	4
1.5 Peta Proses Bisnis	6
1.6 Aspek Strategis serta Permasalahan utama dan Isu Strategis.....	9
1.7 Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset	11
1.8 Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025	12
1.9 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Strategi dan Kebijakan	16
2.2 Rencana Kinerja Tahun Berjalan.....	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Bersangkutan	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	26
3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2025.....	27
3.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir	55



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	56
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	57
3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	59
3.8 Aspek Keuangan	65
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1	Rincian Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025	12
Tabel 1.2	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024	13
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran	19
Tabel 2.2	Tabel Rencana Kinerja Bersangkutan	21
Tabel 2.3	Program Jangka Menengah Perubahan RPJMD (Tabel 7.2B)	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 2.5	Anggaran yang mendukung kinerja pada tahun 2025 (APBD)	23
Tabel 2.6	Anggaran yang mendukung kinerja pada tahun 2025 (APBN)	24
Tabel 3.1	Kriteria Nilai	25
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Sasaran 1	26
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Sasaran 2	27
Tabel 3.4	Perkembangan Inflasi Provinsi Bali dan Nasional	31
Tabel 3.5	PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN BAHAN POKOK TAHUN 2024.....	32
Tabel 3.6	Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali Tahun 2025	34
Tabel 3.7	Data Distributor, Sub Distributor dan Agen Provinsi Bali	35
Tabel 3.8	JUMLAH EKSPORTIR BALI 2025.....	41
Tabel 3.9	REKAP PENDAMPINGAN DAN FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL UPTD. RUMAH KREATIF DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI 2023 dan 2024	54
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir	55
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi	56



Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	57
Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	59
Tabel 3.15 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	59
Tabel 3.16 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	63
Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cascading Disperindag	5
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	7
Gambar 1.3 Profil Demografi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan .	11
Gambar 1.4 Profil Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	12
Gambar 3.1 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 1	28
Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Menurut Lapangan Usaha	30
Gambar 3.3 Perkembangan Ekspor Provinsi Bali Dari Tahun 2021 – 2025.....	39
Gambar 3.4 Realisasi Persentase Produk Yang Terserap Pasar.....	42
Gambar 3.5 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 SASARAN 2	44
Gambar 3.6 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Menurut Lapangan Usaha	46
Gambar 3.7 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Bali pada Tahun 2020 – 2024	48
Gambar 3.8 Perkembangan Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Bali pada Tahun 2020 – 2024	49
Gambar 3.9 Fasilitasi Desain UPTD – Rumah Kreatif pada Tahun 2023 – 2024	53





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Cascading Kinerja Sebagai
Dasar Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah

1.5 Peta Proses Bisnis

1.6 Aspek Strategis serta
Permasalahan utama dan
Isu Strategis

1.7 Sumber Daya Manusia
(SDM) serta Sarana dan
Prasarana Berdasarkan
Jenis Aset

1.8 Anggaran Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali
Tahun 2024

1.9 Tindak Lanjut atas
Laporan Hasil Evaluasi
SAKIP 2023





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
2. Mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerjanya.





1.2 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja atas indikator sasaran yang telah ditetapkan sepanjang tahun anggaran 2025.

B. Tujuan

Tujuan utama dari penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada tahun 2025. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam mengevaluasi permasalahan yang ada, serta sebagai acuan dalam merumuskan program-program di tahun berikutnya. Dengan demikian, program-program di tahun mendatang dapat disusun dengan lebih terfokus, efektif, efisien, terukur, dan tetap mengutamakan transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Mendorong pelaksanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





- b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan umpan balik dari seluruh *stakeholders*, guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan berkualitas;
- c) Memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, efisien, serta responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

1.3 Landasan Hukum

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;





7. PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
9. Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045;
10. Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;

1.4 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

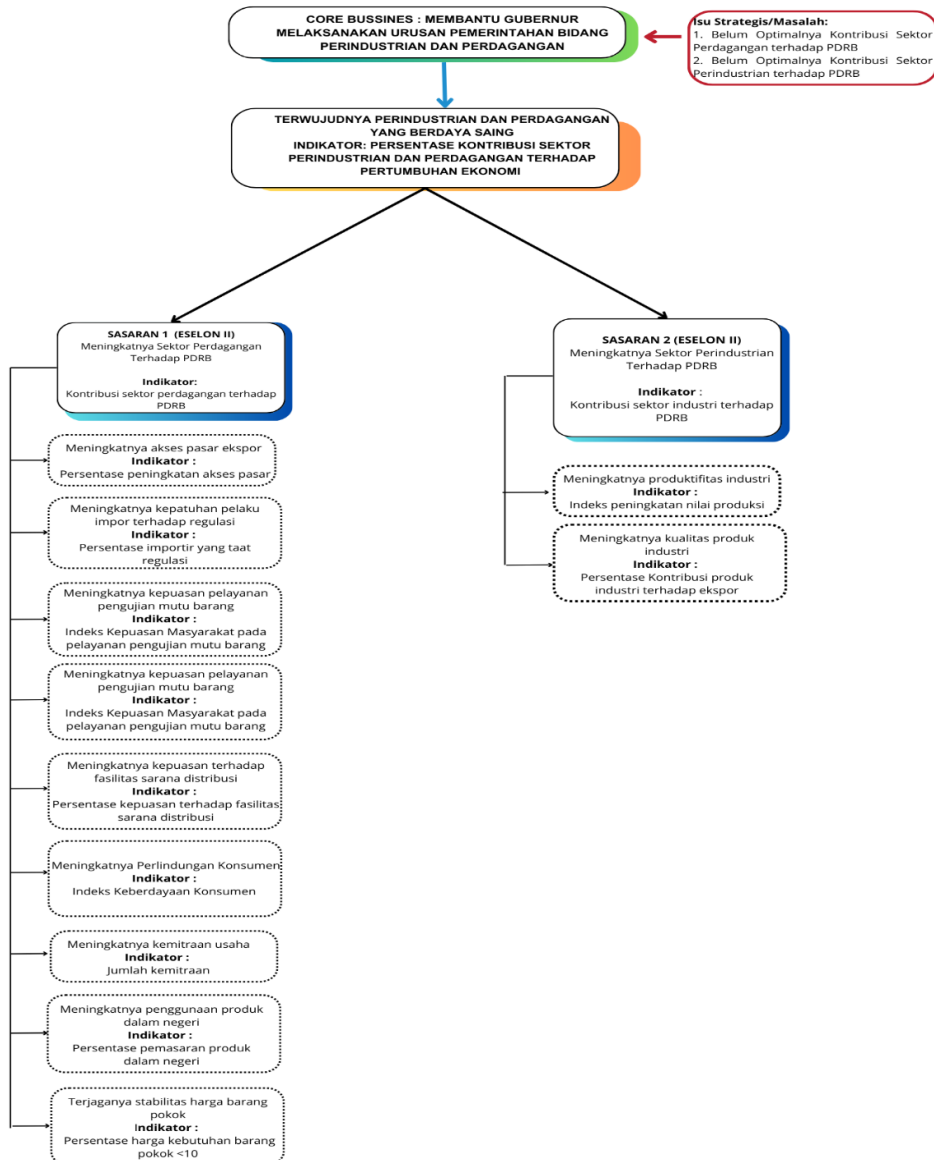
Cascading adalah proses penurunan atau penerjemahan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dari tingkat organisasi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, seperti unit kerja atau individu, sehingga setiap bagian dalam organisasi dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan utama organisasi.

Dalam konteks organisasi berbasis kinerja, cascading sering digunakan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi (misalnya pemerintah daerah) dapat diterjemahkan dengan jelas ke dalam aktivitas yang lebih operasional dan dapat diukur di tingkat unit kerja atau individu. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh elemen organisasi agar bekerja menuju pencapaian hasil yang diinginkan.



Sesuai dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja yang telah di terapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang mana setiap Perangkat Daerah dibentuk agar memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.1
CASCADING DISPERINDAG



1.5 PETA PROSES BISNIS

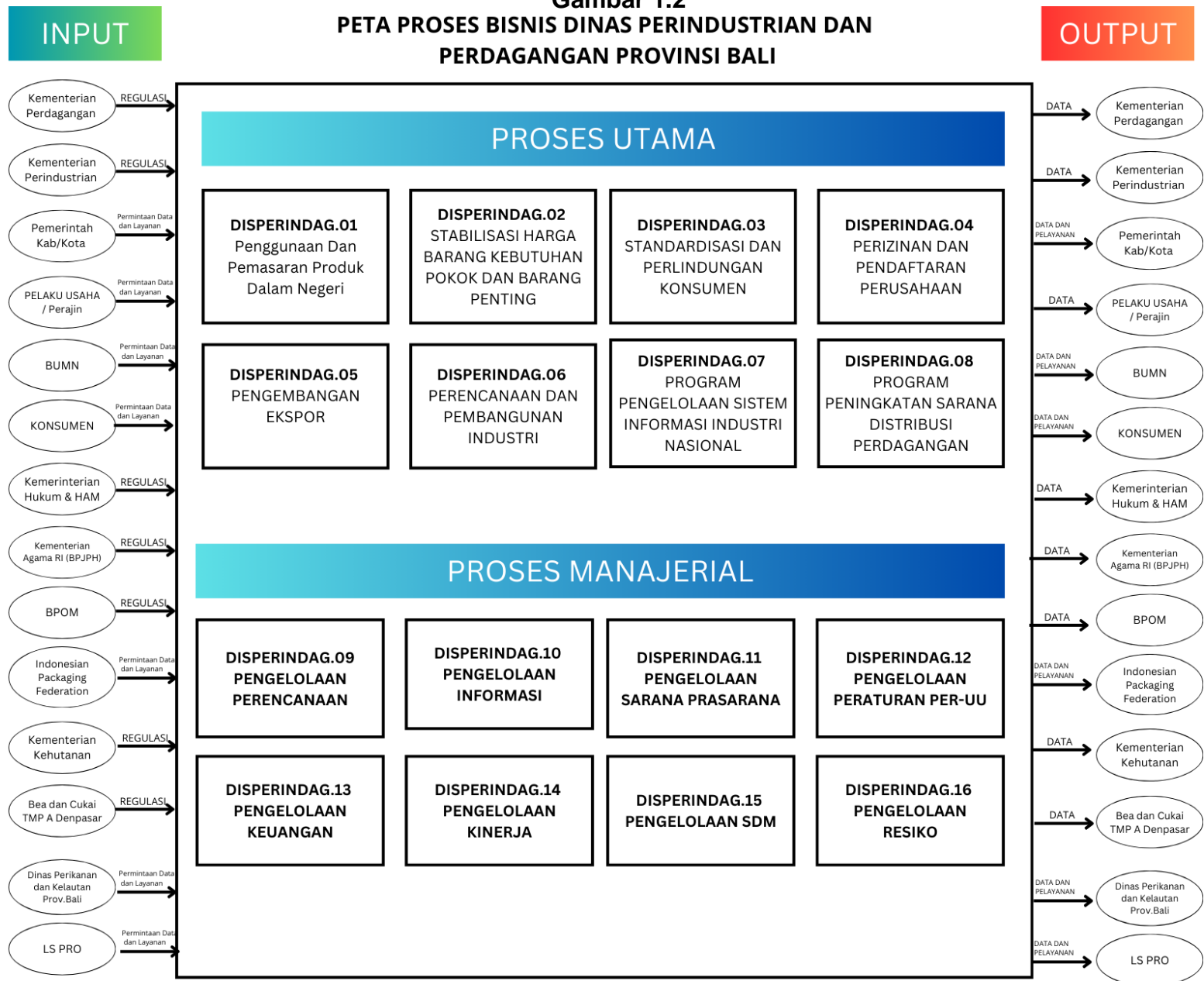
Peta Proses Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis alur kerja, tahapan, serta interaksi antar unit atau bagian di dalam organisasi. Peta ini memetakan langkah-langkah yang terlibat dalam setiap proses bisnis yang ada di Disperindag, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program. Dengan peta proses bisnis, Disperindag Provinsi Bali dapat mengidentifikasi alur kerja yang lebih efisien, mengurangi potensi hambatan, serta memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Melalui peta proses bisnis ini, Disperindag dapat memahami dengan jelas bagaimana tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja terhubung satu sama lain, sehingga mempermudah koordinasi dan kolaborasi antar bagian. Selain itu, peta ini juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa semua proses yang dilakukan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan industri dan perdagangan di Provinsi Bali.

Dengan adanya peta proses bisnis yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, Disperindag Provinsi Bali dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi peluang perbaikan, merumuskan kebijakan yang tepat, serta memonitor kinerja organisasi secara lebih efektif. Secara umum peta proses bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2
PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI BALI



C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan unsur





pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Sekretaris
 - Subag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perindustrian
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Susunan Organisasi UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut ini :

- a. UPT Rumah Kreatif
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Kepala Seksi Industri Digital
 - Kepala Seksi Desain Produk dan Kemasan
- b. UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Kepala Seksi Mutu Pelayanan Laboratorium

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok : Melaksanakan urusan pemerintah bidang





Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

1.6 Aspek Strategis serta Permasalahan utama dan Isu Strategis

Agar pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek strategis yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara



optimal. Permasalahan pembangunan pada bidang ekonomi yang meliputi perindustrian dan perdagangan sebagai berikut:

a. Perdagangan

- 1) Akses pasar dan jaringan pemasaran lemah;
- 2) Infrastruktur perdagangan masih kurang mendukung;
- 3) Kesadaran Pelaku Usaha dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
- 4) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;
- 6) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.

b. Perindustrian

- 1) Daya saing produk Industri Bali masih lemah;
- 2) Keterbatasan bahan baku industri produk lokal maupun ekspor yang tersedia;
- 3) Sistem pengembangan Industri belum komprehensif dan berkelanjutan;
- 4) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI);
- 5) Kemampuan informasi teknologi industri masih lemah.

Dalam penjabarannya sesuai dengan tugas pengembangan sektor industri dan perdagangan, maka dilakukan analisis Isu-Isu Strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor Industri dan Perdagangan dari tahun 2025 – 2029.

Adapun isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali antara lain:

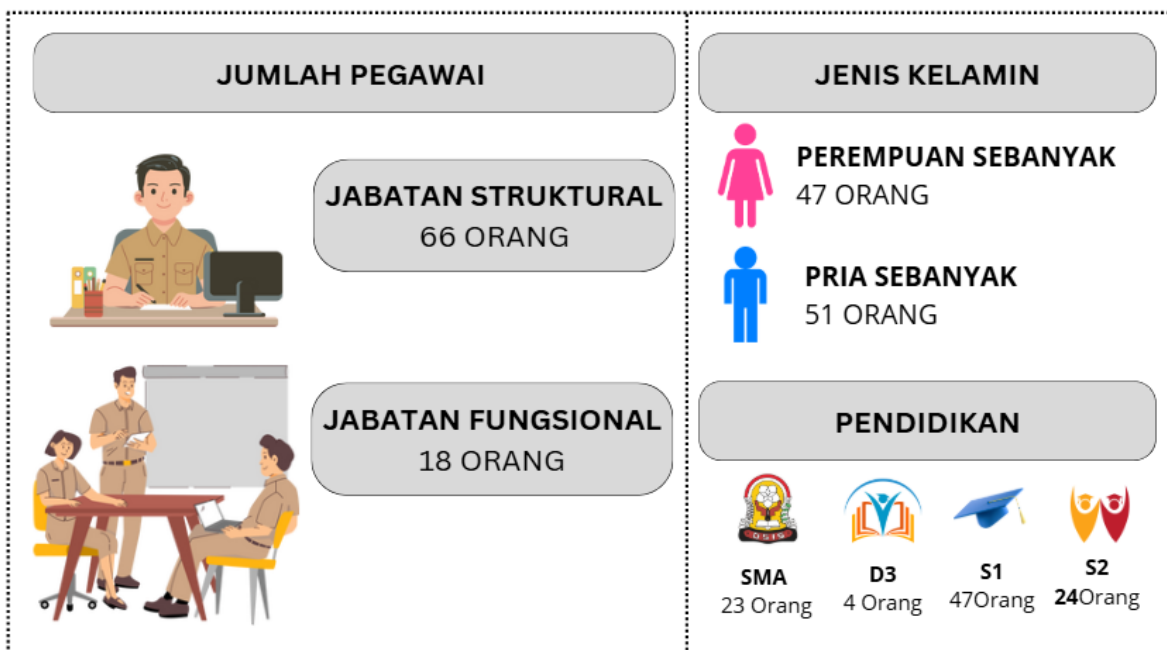


1. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
2. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

1.7 Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Gambar 1.3 Profil Demografi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Selain itu untuk memperlancar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali memiliki sarana dan Prasarana sebagai berikut :



Gambar 1.4 Profil Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan



1.8 Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada Tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp.25.458.044.575,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.24.540.813.455,- atau 96,39% dan belanja modal sebesar Rp.917.231.120,- atau 3,61%. Berikut ini merupakan rincian anggaran tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

Tabel 1.1. Rincian Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
Belanja Operasi	25.458.044.575	96,39%
Belanja Modal	917.231.120,-	3,61%.
Total	21.312.702.146	100%



1.9 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024

Berikut ini merupakan tindak lanjut saran / rekomendasi berdasarkan Surat Inspektorat Provinsi Bali B.09/700/4550/IR.IV/ITPROV 7 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali atas SAKIP Tahun 2024:

Tabel 1.2
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Tindaklanjut
1.	Memastikan keselarasan tujuan dan sasaran antar dokumen Renja dan Renstra.	Melakukan reviu dan penyelarasan tujuan dan sasaran Renja dengan Renstra	Telah dilakukan reviu dan penyelarasan tujuan serta sasaran antara dokumen Renja dan Renstra. Hasil reviu menunjukkan bahwa seluruh tujuan dan sasaran pada Renja telah mengacu dan selaras dengan Renstra.
2.	Mereviu kembali indikator kinerja agar relevan untuk berpengaruh secara langsung terhadap tujuan organisasi	Mereviu dan menyempurnakan indikator kinerja agar relevan dan berdampak langsung pada tujuan organisasi	Disperindag telah melakukan reviu terhadap indikator kinerja. Indikator yang tidak relevan telah disempurnakan sehingga indikator kinerja yang digunakan saat ini lebih mencerminkan capaian tujuan organisasi dan dapat diukur secara jelas.
3.	Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan penetapan target kinerja tahun berikutnya, sehingga perencanaan kinerja ke depan dapat menggambarkan adanya peningkatan kinerja.	Menggunakan data capaian kinerja tahun berjalan sebagai dasar penetapan target tahun berikutnya	Data capaian kinerja pada laporan kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar dalam penetapan target kinerja tahun berikutnya. Penetapan target kinerja dilakukan secara lebih realistis dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
4.	Mendorong pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan	Menyusun dan menggunakan pohon	Pohon kinerja telah disusun dan digunakan





No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Tindaklanjut
	sehingga keselarasan antara pohon kinerja dengan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik.	kinerja sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan	sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan. Dengan demikian, keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, dan program/kegiatan dalam dokumen perencanaan telah tergambar secara jelas dan selaras.
5.	Melengkapi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja dengan target setiap triwulan agar capaian kinerja lebih realistis dan dapat dicapai.	Melengkapi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dengan target per triwulan	Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja telah dilengkapi dengan target capaian setiap triwulan. Hal ini memudahkan proses monitoring dan memastikan capaian kinerja lebih realistis serta dapat dicapai.
6.	Memastikan dokumen IKU dilengkapi dengan metodologi definisi yang jelas untuk mengukur indikator kinerja, formulasi dan sumber data.	Melengkapi dokumen IKU dengan definisi operasional, formulasi, dan sumber data	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi pengukuran, serta sumber data yang jelas, sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara konsisten dan akurat.
7.	Mendorong capaian realisasi target indikator kinerja.	Melakukan monitoring berkala dan asistensi pencapaian target kinerja	Telah dilakukan monitoring capaian kinerja secara berkala untuk mendorong pencapaian realisasi target indikator kinerja. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kinerja
8.	Menyusun SOP Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja.	Menyusun dan menetapkan SOP Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja	SOP Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja telah disusun dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan organisasi





No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Tindaklanjut
			dengan Nomor : B.18.000/7914/SEKRE T/DISPERINDAG.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Strategi dan Kebijakan

2.2 Rencana Kinerja Tahun Berjalan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Bersangkutan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Sejalan dengan upaya mewujudkan perindustrian dan perdagangan bali yang berdaya saing, maka strategi pengembangan industri dan perdagangan, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pembinaan Industri yang berorientasi ekspor, berdasarkan kompetensi inti daerahnya masing-masing. Peningkatan keterampilan para pengrajin melalui pelatihan dan magang. Selain itu pula menggunakan sistem kluster dan fokus pada satu desa satu produk (OVOP).
2. Mengkordinasikan tersedianya bahan baku industri kerajinan. Memfasilitasi adanya kerjasama dengan daerah lain sebagai penghasil bahan baku yang dibutuhkan oleh para pengrajin.
3. Memfasilitasi pemasyarakatan teknologi industri, menyarankan agar para pengusaha/pengrajin mau dan dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG) sehingga terwujud efisiensi produksi.
4. Mengupayakan bantuan tenaga ahli teknik dan desain untuk diversifikasi produk. Memfasilitasi agar para pengrajin mendapat bantuan tenaga yang ahli dibidang teknik dan desain produk kerajinan, sehingga mampu menghasilkan inovasi produk dengan desain yang memenuhi selera pasar dan dapat bersaing dipasar global.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), melakukan sosialisasi dan bimbingan melalui pembentukan klinik HKI.



6. Melakukan fasilitasi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok industri kreatif, meliputi 15 sub sektor yaitu periklanan, arsitektur, animasi, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi & radio, riset dan pengembangan.
7. Memfasilitasi peningkatan promosi maupun pemasaran. Mengupayakan agar para produsen/pedagang dapat mempromosikan sekaligus menjual produknya di beberapa daerah di Indonesia, serta di beberapa negara lain yang dipandang potensial sebagai pangsa pasar ekspor. Selain itu sebaiknya Provinsi Bali mempunyai fasilitas tempat pameran bertaraf internasional sehingga para pengusaha dapat melakukan pameran/promosi di Bali dan tidak harus berpameran di daerah lain atau negara lain. Bahkan daerah lainpun dapat berpameran di Bali, hal ini disebabkan nama Bali yang sudah terkenal di tingkat nasional dan internasional, dimana Bali dapat menjadi *market point*. Dengan terbangunnya pameran bertaraf internasional pameran/promosi dapat ditingkatkan jumlah pesertanya maupun intensitas pelaksanaannya dengan biaya yang lebih ringan, dapat pula pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk memenuhi selera pasar juga dapat direncanakan untuk membangun sebuah design centre sebagai tempat pengembangan design yang mengikuti selera pasar.
8. Memfasilitasi Peningkatan efektifitas dan efisiensi perdagangan. Mengupayakan peningkatan perlindungan konsumen, dan memperkuat sistem pengawasan barang dan jasa. Pelaksanaannya dilakukan melalui program perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar terutama barang-barang yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan,



keamanan, lingkungan (K3L), tertib usaha, dan tertib ukur. Optimalisasi peran laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu barang. Mengupayakan adanya integritas pasar yang baik, tertib, teratur, dipercaya dan pembentukan harga yang transparan merupakan salah satu cerminan terhadap tingkat efektivitas mekanisme pasar. Lancarnya distribusi barang, tersedianya stock secara berkesinambungan serta tidak adanya beban distribusi yang tidak resmi dan berlebihan merupakan wujud dari mekanisme perdagangan yang efisien.

9. Memfasilitasi pengembangan ekspor. Selain komoditi kerajinan yang sangat potensial sebagai komoditi ekspor, di Bali juga diupayakan pengembangan komoditi agro, mengingat pangsa pasar yang cukup banyak, lahan pertanian untuk agro bisnis cukup luas dan cukup subur.
10. Melakukan pembinaan kepada para eksportir maupun calon eksportir dalam rangka peningkatan SDM.
11. Mengupayakan peningkatan pelayanan informasi.
12. Menyediakan dan memberikan berbagai informasi mengenai kebijakan maupun teknis pelaksanaan berkenaan dengan sektor industri dan perdagangan, bagi masyarakat, lembaga/ instansi yang membutuhkan.
13. Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan kepada pelaku usaha baik importir maupun eksportir.
14. Peningkatan peran kelembagaan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada eksportir dan importir.
15. Pembinaan untuk peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
16. Peningkatan akses pasar ke negara-negara target ekspor melalui promosi.
17. Melakukan pengembangan pasar dengan pengamatan terhadap pasar potensial, segmen pasar, pemasok dan pesaing.



18. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan *Stakeholders* dalam rangka masukan untuk kerjasama perdagangan internasional.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing	Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%	9%	9%	9%	9,05 %
	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,10 %

b. Kebijakan

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan untuk mencapai keberhasilan perlu ditetapkan kebijakan yang ditempuh melalui sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait guna menentukan kebijakan.

Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali adalah :

1. Mengembangkan industri berdaya saing tinggi yang berbasis kompetensi inti daerah melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar serta peningkatan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi.
2. Mengembangkan industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau.
3. Mengembangkan Sistem Informasi Industri yang terintegrasi meliputi unsur Institusi, Sumber Daya Manusia, Basis Data, Perangkat Keras dan Lunak,



serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan informasi industri.

4. Menetapkan target ekspor daerah, mendorong peningkatan kualitas produk ekspor yang bernilai tambah tinggi, meningkatkan kemudahan fasilitasi pelayanan publik, memanfaatkan hasil kerjasama perdagangan internasional, mendorong para pengusaha untuk menjadi eksportir dan meningkatkan partisipasi pengusaha Bali dalam jaringan global dan promosi.
5. Menjaga ketersediaan dan distribusi serta stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting.
6. Meningkatkan sosialisasi untuk membentuk konsumen cerdas dan melakukan pengawasan perlindungan konsumen.

2.2 Rencana Kinerja Tahun Berjalan

Untuk memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Disperindag Provinsi Bali menetapkan Rencana Kinerja Tahun Berjalan untuk dapat mengukur kinerja selama setahun yang merupakan dari Rencana Strategis Disperindag Provinsi Bali Tahun 2025 – 2029. Rencana Kinerja Tahun Bersangkutan adalah kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025, memuat informasi tentang : (1) Tujuan (2) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (3) Indikator kinerja sasaran ; (4) Satuan; (5) target capaian.

Sasaran atas kinerja setahun merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur



berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Sasaran yang akan dicapai Disperindag Provinsi Bali pada tahun 2025.

Target dari masing-masing indikator dicapai dan diukur dari hasil pelaksanaan program/kegiatan pada Disperindag Provinsi Bali, dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung sasaran dalam RPD akan dicapai melalui sasaran dan indikator dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan kata lain tercapainya target dalam IKU Perangkat Daerah akan mampu mendukung pencapaian sasaran dalam RPJMD

Tabel 2.2
Tabel Rencana Kinerja Bersangkutan

Tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Target
Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing	Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase	9,05 %
	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase	6,10 %

Tabel 2.3
Program Jangka Menengah Perubahan RPJMD dan Rencana Pembangunan Daerah (Tabel 7.2B)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi				Target RPD 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,08	83,24	83,41	83,86	82,5
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,07%	84%	85,14%	85,14%	82%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar ber SNI	4	5	5	1	1
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang Pokok	3,20%	4,72%	3,32	9,9	7%
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	59,44%	60,99%	59,79	56,79	55%
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,68	52,35	56,05	59,65	49,72
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30%	30%	30%	30%	30%



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi				Target RPD 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,08	83,24	83,41	83,86	82,5
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,50%	1,62%	36,01%	7,5%	1,5%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Data Industri	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Bersangkutan

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai melalui dana : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali : DPPA/A.3/3.31.3.30.0.00.02.0000/001/2025, tanggal 2 Januari 2025, adapun perjanjian kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan utama (yang menunjukkan *core bussines* SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,05 %
Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,10 %

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan pendukung dapat dijabarkan anggaran yang mendukung kinerja pada tahun 2025 seperti tabel berikut:

Tabel 2.5
Anggaran yang mendukung kinerja pada tahun 2025 (APBD)

PROGRAM PRIORITAS	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	24.968.600	APBD
2 Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	300.832.962	APBD
3 Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	243.576.100	APBD
4 Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	302.955.644	APBD
5 Program pengembangan Ekspor	99.999.600	APBD
6 Program standarisasi dan perlindungan konsumen	834.014.578	APBD
7 Program perencanaan dan pembangunan industri	2.665.522.286	APBD
8 Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	49.999.900	APBD
9 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	19.483.383.843	APBD
TOTAL	24.005.253.513	





Tabel 2.6
Anggaran yang mendukung kinerja pada tahun 2025 (APBN)

PROGRAM APBN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.674.684.000	APBN
Total		1.674.684.000	





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

3.2

Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024

3.3

Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.6

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

3.8

Aspek Keuangan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2025 yang telah disepakati. Untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja, dilakukan pengumpulan data kinerja yang hasilnya dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

TABEL 3.1
KRITERIA NILAI

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Nilai Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian





dan Perdagangan Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai tiga sasaran utama dalam meningkatkan kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi dari perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja perangkat daerah. Adapun tiga sasaran yang dimaksud antara lain :

TABEL 3.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 1

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%	8,68 %	96,55%	9,05 %	8,78%	85,96%

Pada sasaran 1 Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ditetapkan satu indikator kinerja yaitu :

- a. Pada tahun 2025 indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Bali tercapai sebesar 8,78% dari target 9,05% realisasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 8,68%



TABEL 3.3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 2

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MENINGKATNYA DAYA SAING INDUSTRI	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,04%	6,25%	103,33%	6,10%	6,23%	102,13%

Indikator kinerja Meningkatnya Daya Saing Industri ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tahun 2025 Realisasi Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 6,23% sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,13% dari target yang telah ditentukan sebesar 6,10%.

3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2025

3.2.1 Sasaran Strategis Satu

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

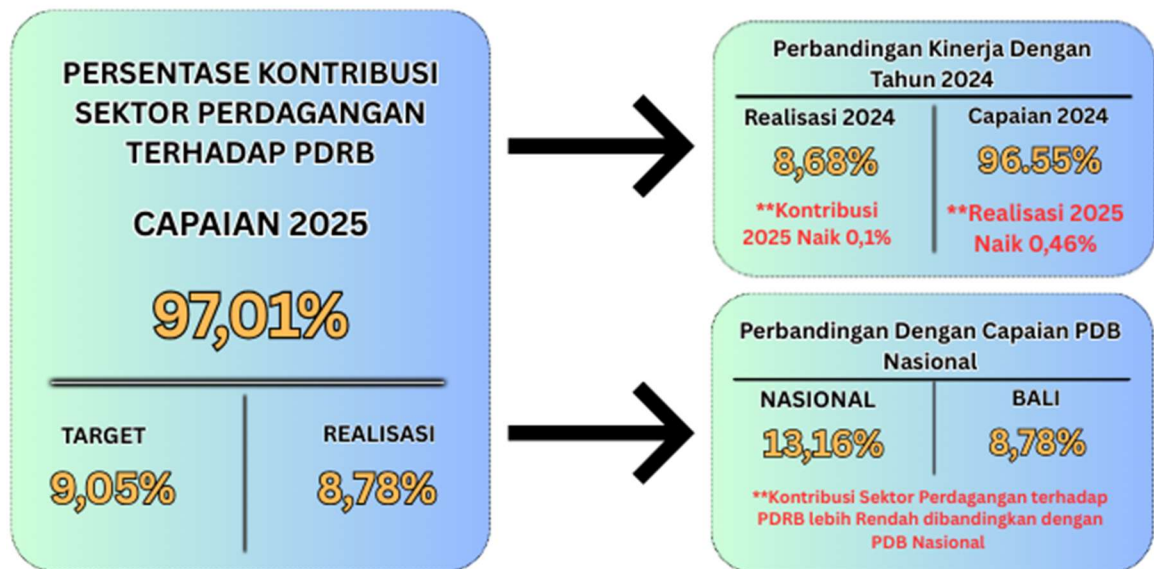
Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan suatu pendekatan yang lebih



realistik. Akan tetapi selama ini tetap mengacu pada model perhitungan secara nasional, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) yang mana dalam perhitungan riilnya yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Peranan sektor perdagangan, pertumbuhan ekonomi maka diperlukan angka proyeksi pertumbuhan peranan sektor perdagangan, dalam pertumbuhan ekonomi maka diperlukan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Angka proyeksi pertumbuhan ekonomi sektor ini akan mendukung keakuratan proyeksi pertumbuhan ekonomi secara agregat. Berdasarkan hal-hal tersebut, realisasi PDRB sektor perdagangan di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel berikut :

Gambar 3.1

ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 SASARAN 1



Sumber Data : BPS Bali





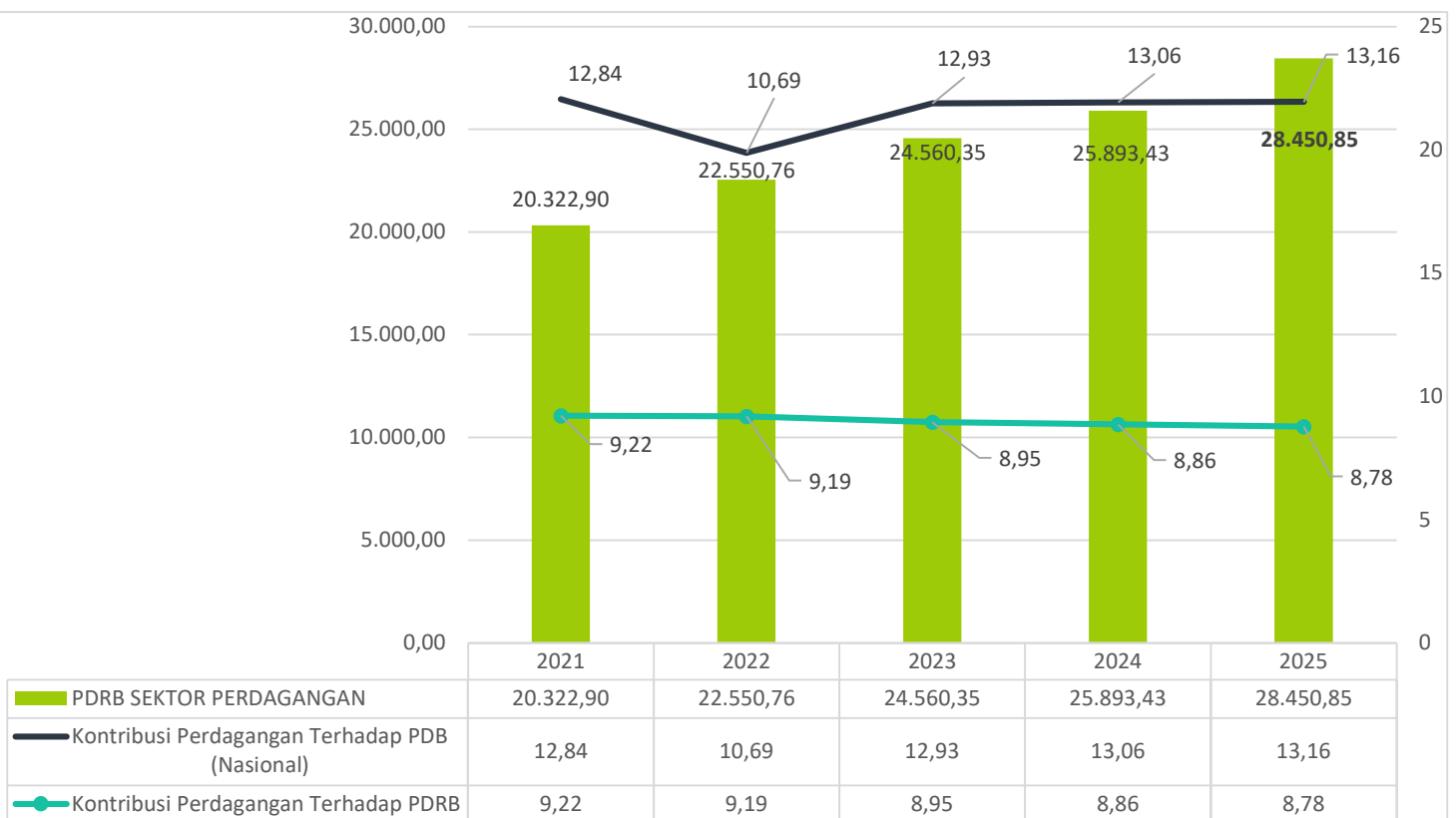
Dengan dinamika tersebut, kontribusi PDRB sektor pariwisata di Bali tetap menjadi yang paling dominan dibandingkan sektor lainnya, termasuk perdagangan. Hal ini sejalan dengan karakteristik struktur ekonomi Bali yang bertumpu pada aktivitas berbasis jasa wisata, seperti akomodasi, makan minum, transportasi, serta jasa hiburan dan rekreasi. Peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara tidak hanya mendorong sektor perdagangan, tetapi secara langsung memperbesar nilai tambah pada sektor penyediaan akomodasi dan konsumsi wisata.

Selain itu, belanja wisatawan yang lebih tinggi per kunjungan turut memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB. Dampak berganda (*multiplier effect*) dari aktivitas pariwisata juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung seperti UMKM, industri kreatif, transportasi lokal, hingga jasa keuangan. Dengan struktur ekonomi yang semakin pulih dan terkonsolidasi, sektor pariwisata tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB daerah, Kategori kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.



Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB secara nilai dan persentase dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 3.2
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Menurut Lapangan Usaha



Sumber Data : BPS Provinsi Bali



Kebutuhan Pokok adalah merupakan kebutuhan utama masyarakat yang begitu kompleks untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, seperti : dapat hidup sehat, berpakaian, dan berteduh serta memperoleh pendidikan. Kebutuhan primer ini apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan dampak yang negatif. Target persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok secara nasional sebesar <10% dengan capaian realisasi perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bali lebih kecil dari target nasional yaitu **8,7%**. Ini menandakan perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bali sangat stabil. Untuk menjaga agar kebutuhan barang pokok dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, maka ketersediaan dan harga mendapat perhatian yang utama. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada tahun 2025 menetapkan sasaran strategis Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok.

Berdasarkan data yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Sampai dengan akhir tahun 2025, secara kumulatif Provinsi Bali *Year-on-Year* mengalami inflasi 2,91% **capaian ini masih lebih baik dari capaian nasional yang berada pada 2,92%**. di gambarkan sebagaimana tabel berikut perbandingan inflasi dengan beberapa provinsi :

Tabel 3.4
PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI BALI DAN NASIONAL

No	Provinsi	IHK	Inflasi YoY (%)	Inflasi MoM (%)
1	Bali	111,01	2,91	0,7
2	Nusa Tenggara Barat	110,26	3,01	0,72
3	Nusa Tenggara Timur	108,94	2,39	0,81
4	Kalimantan Barat	108,8	1,85	0,28
5	Kalimantan Tengah	109,98	3,13	1,04
6	Kalimantan Selatan	111,06	3,66	0,76
7	Kalimantan Timur	109,8	2,68	0,71
8	Kalimantan Utara	108,44	2,57	0,54





No	Provinsi	IHK	Inflasi YoY (%)	Inflasi MoM (%)
9	Sulawesi Utara	108,6	1,23	0,51
10	Sulawesi Tengah	110,71	3,31	0,14
11	Sulawesi Selatan	109,28	2,84	0,49
12	Sulawesi Tenggara	109,61	2,86	0,22
13	Gorontalo	109,29	2,52	0,88
14	Sulawesi Barat	109,43	2,48	0,58
15	Maluku	110,82	3,58	0,81
16	Maluku Utara	110,08	1,63	0,05
17	Papua Barat	110,74	2,59	1,6
18	Papua Barat Daya	107,62	2,15	0,65
19	Papua	108,34	2,54	1,77
20	Papua Selatan	111,08	2,95	0,81
21	Papua Tengah	114,27	3,28	0,96
22	Papua Pegunungan	115,4	3,22	1,58
	NASIONAL	109,92	2,92	0,64

Sumber Data: BPS Provinsi Bali

Rendahnya perolehan inflasi ini terkait dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam stabilitas harga, yaitu dengan dilakukannya pemantauan harga secara rutin dan kelancaran arus distribusi/ketersediaan stok, yang di lanjutkan dengan gerakan pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar Sepanjang tahun 2025.

Pada tahun 2025 capaian kinerja terkait perkembangan harga kebutuhan perkembangan harga kebutuhan bahan pokok sebesar 8,7% diatas target yang ditetapkan yaitu 9% namun capaian ini sudah lebih baik dari tahun 2024 yaitu sebesar 9,9%. Seperti digambarkan pada tabel berikut :

TABEL 3.5
PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN BAHAN POKOK TAHUN 2025

KOMODITI	Satuan	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nop	Des	Rata-rata	Std-Dev	Kovar
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Beras Medium I	Kg	14.250	14.303	14.341	14.371	14.046	14.046	14.546	14.849	14.750	14.614	14.533	14.479	14.427	251	1,7
Beras Super I	Kg	15.875	15.925	15.889	15.857	15.476	15.952	15.786	16.262	15.881	15.876	15.825	15.765	15.864	176	1,1





KOMODITI	Satuan	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nop	Des	Rata-rata	Std-Dev	Kovar
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Beras Medium (Beras SPHP)	Kg	11.926	12.000	11.905	11.824	11.842	11.824	11.654	11.719	11.783	11.961	11.937	11.914	11.857	103	0,9
Beras Premium	Kg	15.490	15.500	15.581	15.643	15.439	15.459	15.692	15.874	15.833	15.770	15.618	15.576	15.623	145	0,9
Minyak Goreng	Liter	19.025	19.384	19.352	19.704	19.722	19.694	19.852	19.981	19.964	19.981	20.000	20.038	19.725	320	1,6
Daging Babi	Kg	04.975	07.462	107.509	08.231	105.353	100.190	91.700	87.404	86.475	104.216	90.288	87.176	98.415	8996	9,1
Daging Sapi Has Luar	Kg	18.542	17.462	21.667	120.208	118.750	17.708	19.800	18.958	119.167	119.583	120.826	118.261	119.244	1245	1,0
Daging Ayam Ras	Kg	40.894	40.843	40.044	37.755	39.662	39.372	39.939	39.730	42.600	40.624	41.161	41.204	40.319	1201	3,0
Telur Ayam Ras	Kg	28.289	27.764	28.104	27.186	27.632	27.799	28.366	28.640	28.115	28.806	28.870	28.224	28.150	498	1,8
Cabai Merah Besar	Kg	65.087	64.297	53.346	33.934	25.720	25.149	31.872	28.820	42.422	41.259	44.377	29.204	40.457	14113	34,9
Cabai Rawit Merah	Kg	67.767	92.158	07.233	40.763	26.417	64.365	38.476	29.965	33.116	29.701	43.001	57.018	52.498	26061	49,6
Bawang Merah	Kg	32.402	30.031	39.221	41.836	31.671	34.307	47.258	39.975	31.690	34.575	40.686	41.722	37.115	5373	14,5
Bawang Putih	Kg	38.635	39.811	40.421	40.024	36.512	33.217	33.501	32.285	31.691	32.967	33.204	33.581	35.487	3351	9,4
Kangkung	Kg	8.994	6.985	8.019	6.950	7.037	6.722	6.772	6.661	6.522	6.528	6.677	6.656	7.044	733	10,4
Jeruk Lokal	Kg	16.702	15.513	15.546	16.219	15.580	15.210	14.858	14.575	15.219	15.695	16.855	16.016	15.666	688	4,4
Ikan Tongkol	Kg	29.829	30.261	29.731	29.755	30.519	31.500	32.846	32.558	31.170	30.118	30.935	32.235	30.955	1116	3,6
Kacang Panjang	Kg	16.396	13.264	12.561	12.206	14.885	17.041	11.639	12.476	11.473	9.754	11.796	10.278	12.814	2251	17,6
Pisang Ambon	Kg	17.163	17.073	16.752	17.382	17.242	17.084	16.955	16.857	16.898	17.300	18.120	17.780	17.217	396	2,3
Gulaku/Merk Sejenis (Putih)	Kg	18.206	21.333	18.366	18.343	18.465	18.369	18.097	18.081	17.902	17.862	17.815	17.809	18.387	957	5,2
Tepung Terigu Segitiga Biru	Kg	12.406	12.538	12.497	12.515	12.428	12.570	12.681	12.543	12.524	12.367	12.376	12.370	12.485	97	0,8
KOVAR															8,7	

Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Pada tahun 2025 pemantauan perkembangan harga kebutuhan bahan pokok dilakukan di semua pasar tradisional dan pasar modern di seluruh Bali yang diinput kedalam aplikasi SIGAPURA oleh Disperindag Kabupaten/Kota dan memantau sebanyak 20 komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok yang lebih stabil maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Antisipasi kelangkaan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi dari berbagai gejolak yang terjadi sebagai akibat adanya musim kemarau yang



berkepanjangan dan pola permintaan yang meningkat berkenaan dengan hari hari keagamaan telah dilakukan antisipasi sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* di dalam upaya pengendalian inflasi
 - Melakukan operasi pasar minyak goreng di pasar terhadap gejolak harga minyak goreng yang terjadi kenaikannya secara perlahan telah berdampak pada komoditi yang lain.
 - Melaksanakan pasar murah harga menjelang hari-hari keagamaan atau event-event tertentu seperti adanya anomali cuaca untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga.
- b. Memfasilitasi peran serta petani/pelaku usaha produk agro dalam kegiatan pasar tani, pasar murah serta pasar lelang komoditas untuk mempermudah akses pemasaran yang sasarannya masyarakat, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya.

Selain itu untuk menggambarkan kondisi jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ada di 9 Kabupaten/Kota se-Bali pada tahun 2025, maka diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali Tahun 2025

No	Kabupaten	Pasar Tradisional (Unit)	Pasar Modern (Unit)		
			Berjejaring	Non Jejaring	Berjejaring + Non Jejaring
1	Denpasar	50	201	44	245
2	Badung	65	190	44	234
3	Tabanan	14	148	236	384
4	Jembrana	10	20	36	56
5	Buleleng	91	54	15	69
6	Karangasem	20	14	51	65
7	Klungkung	27	10	86	96





No	Kabupaten	Pasar Tradisional (Unit)	Pasar Modern (Unit)		
			Berjejaring	Non Jejaring	Berjejaring + Non Jejaring
8	Bangli	4	30	20	50
9	Gianyar	62	184	0	184
TOTAL		343	851	532	1.383

Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Untuk kelancaran distribusi Barang Pokok Penting maka di tahun 2025 dilaksanakan pemahaman kepada distributor melalui rapat kordinasi. Dengan diberikannya pemahaman kepada para distributor melalui rapat koordinasi maka diharapkan distribusi barang pokok penting pada tahun 2025 berjalan lancar.

Berikut data Distributor, Sub Distributor dan Agen Provinsi Bali Tahun 2025 :

Tabel 3.7
Data Distributor, Sub Distributor dan Agen Provinsi Bali

No	Kabupaten	Jumlah
1	Denpasar	10
2	Badung	118
3	Tabanan	9
4	Jembrana	18
5	Buleleng	14
6	Karangasem	20
7	Klungkung	12
8	Bangli	23
9	Gianyar	16
TOTAL		240

Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun





secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

Indeks keberdayaan konsumen atau IKK adalah indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman, dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Pada tahun 2025 Indeks keberdayaan konsumen Provinsi Bali adalah 63,37 target ini lebih baik dibandingkan dari tahun 2024 yaitu sebesar 59,65, atau meningkat sebesar 3,72 point.

Keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali diantaranya:

1. Menciptakan konsumen cerdas melalui edukasi sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha serta masyarakat sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya selaku konsumen maupun pelaku usaha, serta mengetahui tempat untuk mengadukan bila terjadi sengketa dengan pelaku usaha.
2. Membentuk BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan melakukan proses seleksi untuk menjaring unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota BPSK Kota Denpasar Periode 2021-2026. Berdasarkan proses yang telah dilaksanakan



maka pada tahun 2021 telah terbentuk BPSK Kota Denpasar dengan Nomor Surat Tanda Daftar BPSK : 37/STD/PKTN/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan selanjutnya akan dilakukan seleksi ulang kembali di tahun 2026.

3. Melaksanakan mediasi pengaduan dan konsultasi konsumen oleh BPSK sepanjang tahun 2025 sebanyak 40 kasus yang didominasi oleh kasus produk dan jasa.
4. Melakukan pengawasan barang beredar, utamanya produk-produk ber-SNI. Produk yang diawasi: mainan anak-anak, pakaian bayi, melamin peralatan makanan dan minuman, air minum dalam kemasan, kompor gas, pompa air listrik seklar, kabel listrik, penanak nasi, lampu hemat energi (LHE)
5. Melaksanakan pengawasan penerapan tertib niaga dan legalitas pelaku usaha untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha

SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah label yang menandakan barang tersebut sesuai dengan standar produk yang ada di Indonesia. Dengan adanya label SNI ini masyarakat bisa mengetahui barang mana yang layak dipakai dan tidak layak. Label SNI ini bisa ditemukan pada macam-macam barang. Salah satunya adalah pada mainan anak, helm, peralatan elektronik, accu, pompa air listrik, semen, kabel dan sebagainya. Dengan demikian pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melakukan pengawasan terhadap sebanyak 10 Produk SNI di Provinsi Bali yang diawasi dari jumlah produk SNI





yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional) sebanyak **131** Produk atau **sebesar 9,93 persen**. Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali juga melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa dengan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi dibuktikan dengan 125 laporan pelaksanaan pengawasan barang dan jasa yang dilengkapi dengan dengan manual kartu garansi pada produk seperti kompor gas, kipas angin setrika listrik, penanak nasi serbaguna/magic com.

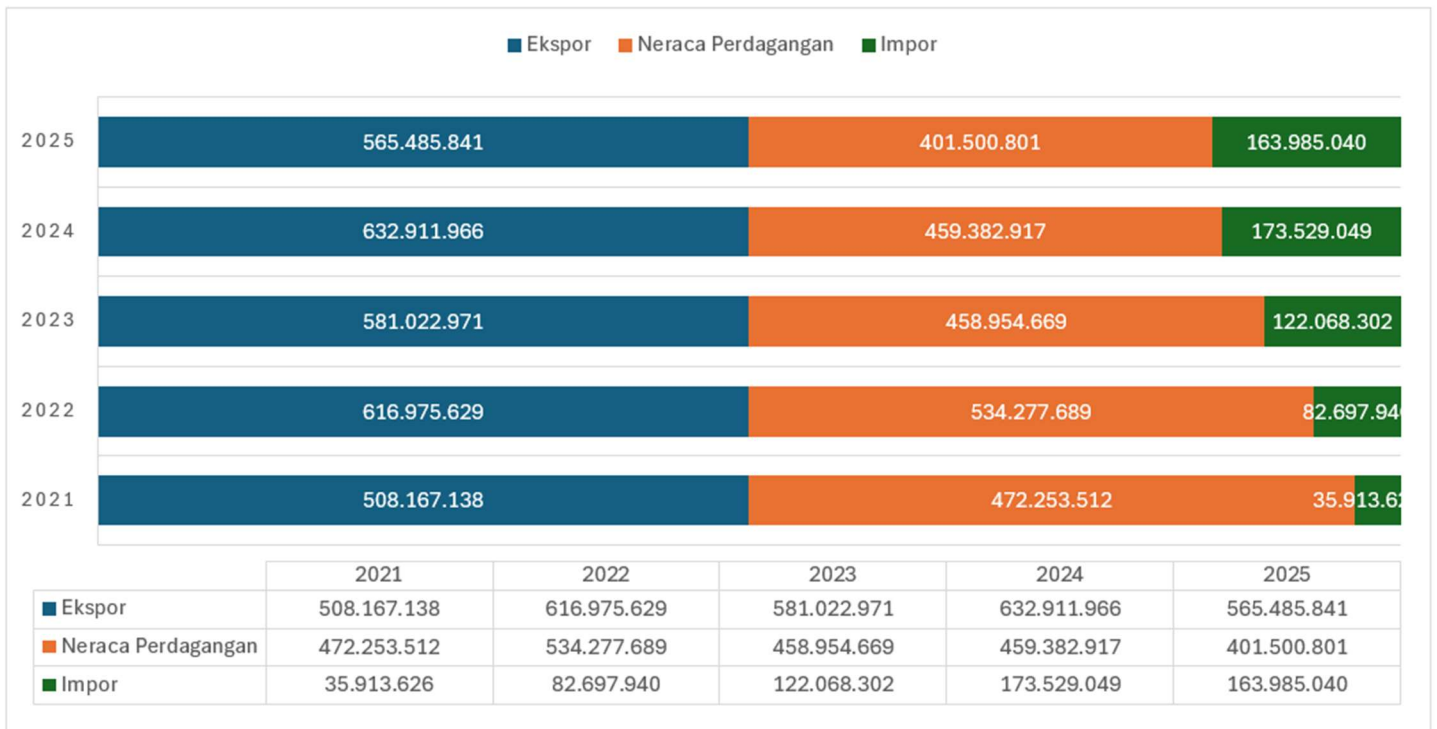
Pengawasan produk SNI dan produk yang wajib melampirkan kartu manual garansi pada penjualan tetap harus dilakukan, bahkan lebih ditingkatkan nantinya pada tahun 2026 karena pengawasan harus dilakukan secara *continue*. Sehingga konsumen terlindungi dari penggunaan produk yang tidak bermutu dan produsen akan memproduksi produk sesuai standar dan pedagang akan menjual produk yang bermutu.

Selain itu peningkatan PDRB Sektor Perdagangan Bali ditunjang dari sektor perdagangan luar negeri (ekspor) dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Penjualan barang oleh eksportir keluar negeri dikenai berbagai ketentuan dan pembatasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas tertentu termasuk cara penanganan dan pengamanannya.



Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbeda-beda.

Gambar 3.3
Perkembangan Ekspor Provinsi Bali Dari Tahun 2021 – 2025



Sumber Data: BPS BALI

Nilai ekspor provinsi bali tahun 2025 berdasarkan Data BPS Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar 11,92% penurunan ini disebabkan karena adanya perang dagang antar negara, penurunan permintaan dari negara mitra dagang dengan kinerja ekonomi, penurunan ekspor yang terjadi di semua sektor juga adanya kebijakan pengetatan moneter dari negara tujuan ekspor, Selain itu ada beberapa masalah yang masih perlu mendapatkan perhatian agar ditahun berikutnya ekspor bali dapat meningkat antara lain design produk yang tidak





sesuai selera pasar (*old style*), harga tidak bisa bersaing serta kurangnya promosi produk ekspor. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain dengan meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kemampuan eksportir, memfasilitasi dengan lembaga keuangan dan dituntut inovasi atau kreatifitas dari pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antara pelaku usaha, pemerintah dan perguruan tinggi. Sebagai pendukung ekspor, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang melakukan pengujian komoditi ekspor (kopi, kakao, panili), sampai dengan tahun 2025 telah melakukan kegiatan pengujian mutu barang dan sertifikasi sebanyak 86 pengujian dari target 60 pengujian.

Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk mengekspor barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melakukan upaya dengan menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang potensial untuk dapat dikembangkan menjadi UKM ekspor melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan ekspor-impor, promosi produk unggulan pada pameran, sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri, serta melalui peningkatan kerja sama dengan Asosiasi dan instansi terkait untuk mendorong eksportir baru. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 529 adanya penurunan dari tahun 2024 dikarenakan banyaknya eksportir yang sudah tidak beroperasi lagi.



TABEL 3.8
JUMLAH EKSPORTIR BALI 2025

Tahun	Jumlah Ekspor
2021	593
2022	636
2023	705
2024	676
2025	529

Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

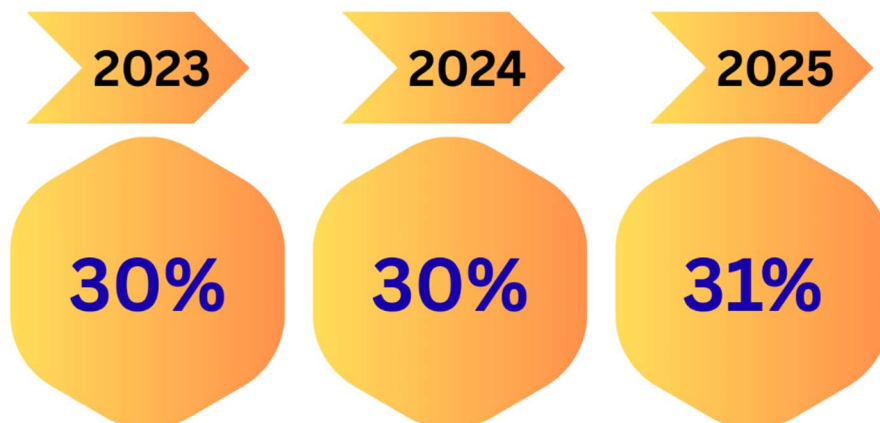
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi lokal, implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 99 Tahun 2018 tentang **Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali** menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi berbasis potensi daerah. Regulasi ini mengatur kewajiban bagi hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan untuk memanfaatkan minimal 30% produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali, sehingga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta produsen industri kecil dan menengah.

Implementasi Pergub ini juga didukung dengan penguatan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal, termasuk digitalisasi pemasaran serta fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan sektor pariwisata dan perhotelan. Dengan demikian, ekosistem ekonomi Bali dapat tumbuh lebih berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan berbasis kearifan lokal yang tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, budaya, dan lingkungan.



Capaian kinerja Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 3.4
Realisasi Persentase Produk Yang Terserap Pasar



Sumber Data : Disperindag Bali

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali terus berkomitmen dalam mendukung perkembangan produk lokal Bali dengan melaksanakan program pembinaan ke berbagai toko sandang. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk lokal mendapatkan ruang lebih besar di pasar, dengan target minimal 30% dari total produk yang dijual di setiap toko sandang berasal dari produsen lokal Bali.

Melalui kegiatan ini, Disperindag memberikan pendampingan kepada pemilik toko dalam memilih dan mengutamakan produk sandang dari pengrajin dan pelaku usaha lokal. Selain itu, Disperindag juga melakukan sosialisasi





mengenai manfaat penggunaan produk lokal, baik dari segi kualitas, keberlanjutan ekonomi, hingga pelestarian budaya khas Bali.

Tak hanya itu, program ini juga melibatkan kerja sama dengan para perajin dan UMKM untuk memastikan ketersediaan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan pasar. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan produk sandang lokal dapat lebih dikenal dan diminati masyarakat luas, sekaligus meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah persaingan pasar modern.

Melalui langkah konkret ini, Disperindag berperan aktif dalam memperkuat ekosistem perdagangan yang berpihak pada produk lokal, sehingga ekonomi daerah dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

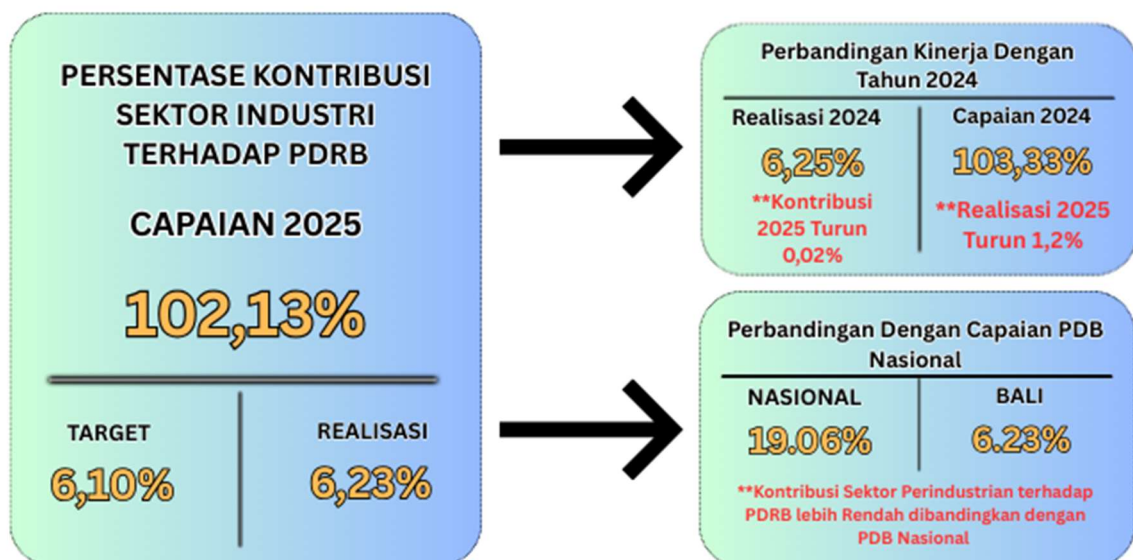


Sasaran Strategis 2

MENINGKATNYA DAYA SAING INDUSTRI

Peningkatan pembangunan ekonomi dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dipandang sebagai indikator yang sangat penting serta memiliki banyak manfaat karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan dan perkembangan ekonomi, keunggulan dan kelemahan yang terdapat pada berbagai sektor dalam struktur perekonomian. Maka dari itu kontribusi sektor industri merupakan salah satu komponen dalam menghitung nilai PDRB di Provinsi Bali, realisasi PDRB sektor perindustrian di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.5
ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 SASARAN 2



Sumber Data : BPS Bali





Pada sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Industri ditetapkan satu indikator kinerja yaitu :

- a. Pada tahun 2025 indikator Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali memiliki target sebesar 6,04% dengan realisasi sebesar 6,23% dan tingkat capaian sebesar 102,13%

Analisa dan data pendukung atas capaian indikator-indikator sasaran strategis dua adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

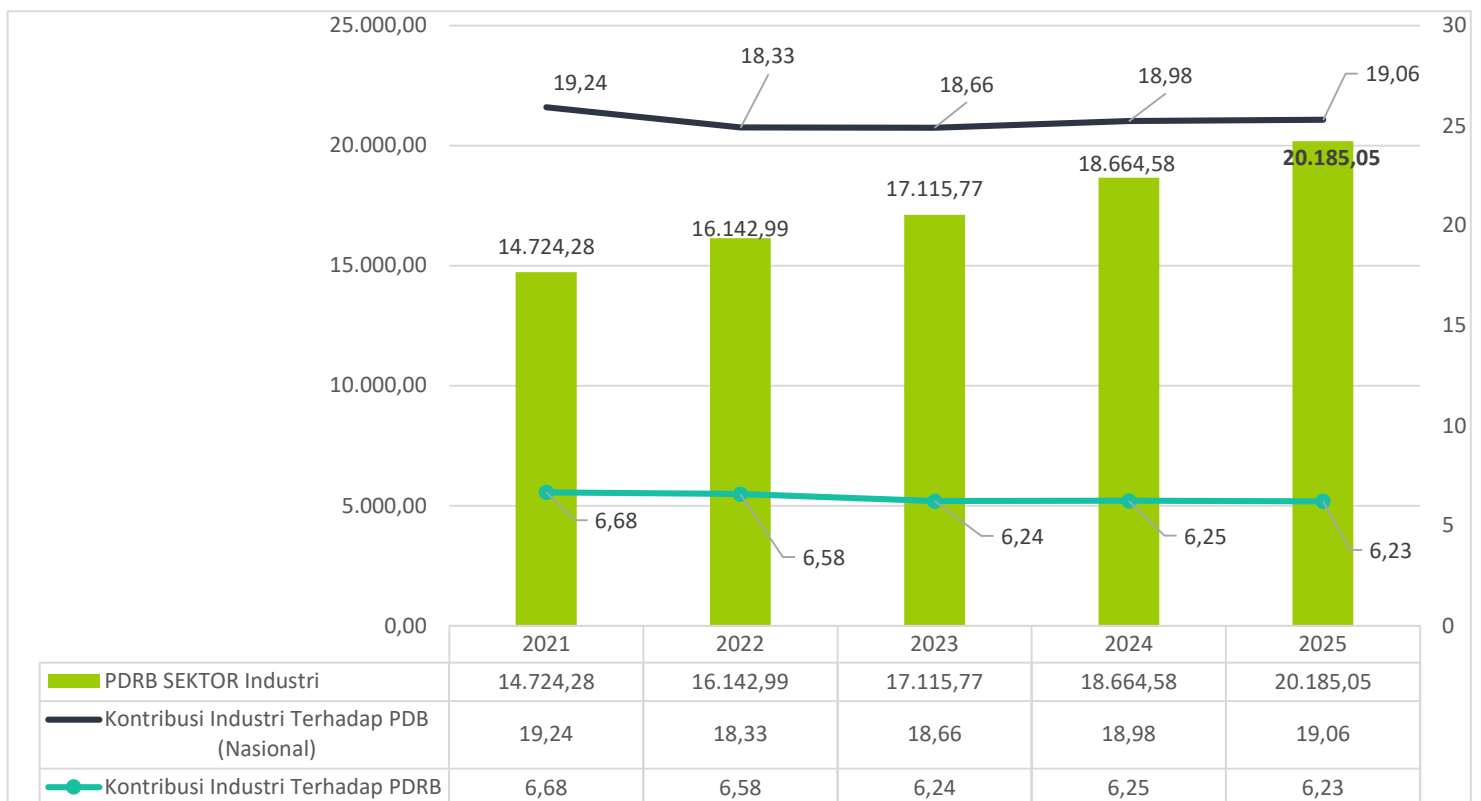
Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggris disebut *Gross Domestic Product*, merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota digunakan PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product*). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan



ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Tujuan Data PDRB tersebut adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Provinsi Bali seperti di gambarkan pada tabel 3.12

Gambar 3.6
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha



Sumber Data : BPS Provinsi Bali

3.2.2.2 Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi Industri

Berbagai tantangan/permasalahan yang dihadapi daya saing industri Bali antara lain: keterbatasan bahan baku, penguasaan teknologi masih kurang, permintaan/selera pasar yang cepat berubah, masuknya produk yang sejenis





dengan harga dan mutu yang lebih bagus, kurangnya inovasi/kreatifitas, masih banyaknya pelaku usaha kurang menyadari akan pentingnya melindungi hasil karya, kemasan produk-produk yang dihasilkan industri bali masih banyak yang kurang menarik/sesuai standar, tuntutan sertifikasi produk, masih rendahnya kemampuan SDM memanfaatkan teknologi dalam memproduksi maupun pemasaran, serta masih lemahnya permodalan serta persaingan dunia global yang semakin tajam.

Strategi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut antara lain: kerjasama bahan baku dengan daerah penghasil, pelatihan teknik produksi, memfasilitasi HKI, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM baik produk maupun kemasannya, memfasilitasi sertifikasi, memfasilitasi akses pembiayaan, pelatihan-pelatihan berbasis IT dan memfasilitasi pemasaran.

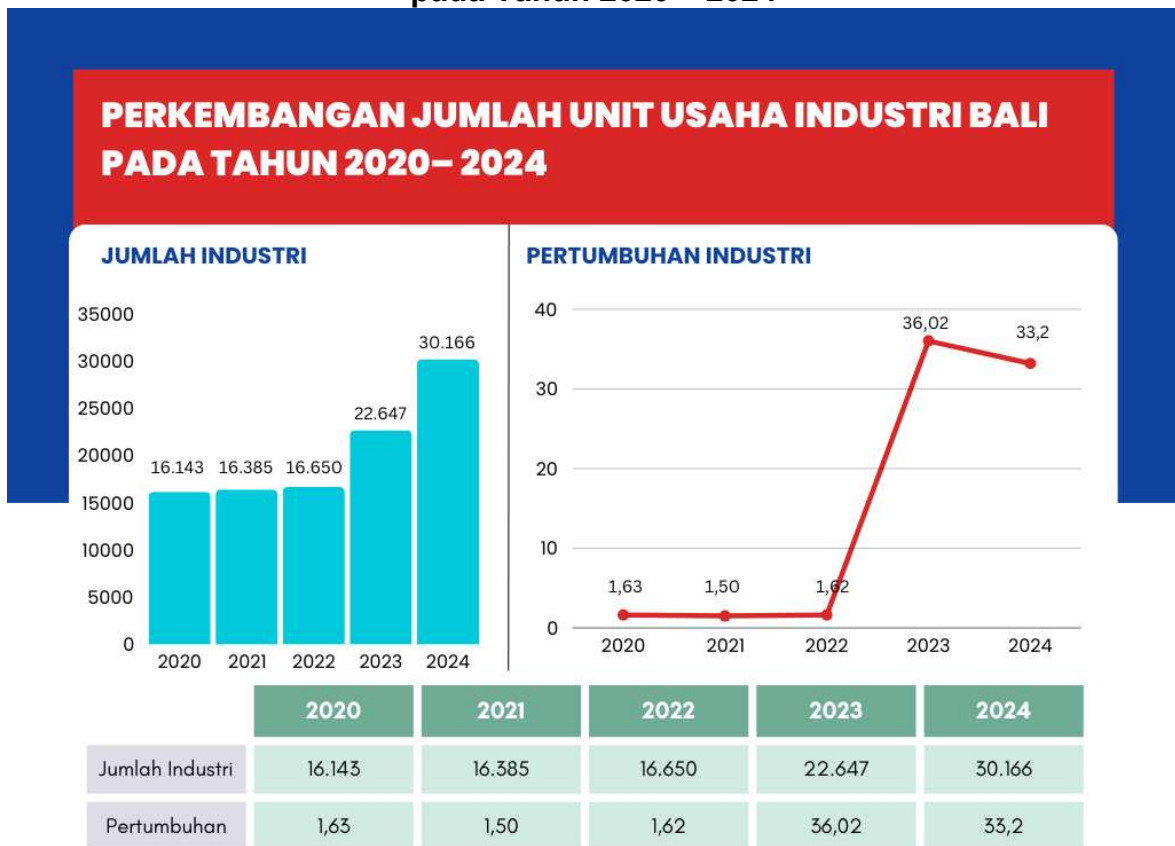
Sehingga dapat meningkatkan jumlah unit usaha dan tenaga kerja industri Provinsi Bali serta nilai ekspor produk-produk industri dapat juga dijadikan indikasi bahwa industri Bali mempunyai daya saing/produktifitasnya meningkat. Berikut diuraikan gambaran kondisi industri di Bali baik unit usaha, tenaga kerja, investasi dan nilai produksi, sebagai berikut :

a. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Bali Pada Tahun 2020 – 2024

Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk jumlah unit usaha pada tahun 2024 sebanyak 30.166 unit usaha, dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 22.647 unit usaha atau meningkat sebesar 33,2% dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3.7
Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Bali
pada Tahun 2020 – 2024



Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Dengan meningkatnya perkembangan jumlah unit usaha industri Bali setiap tahunnya, menandakan bahwa unit usaha sektor industri di Bali sudah tumbuh dan berkembang dengan baik.

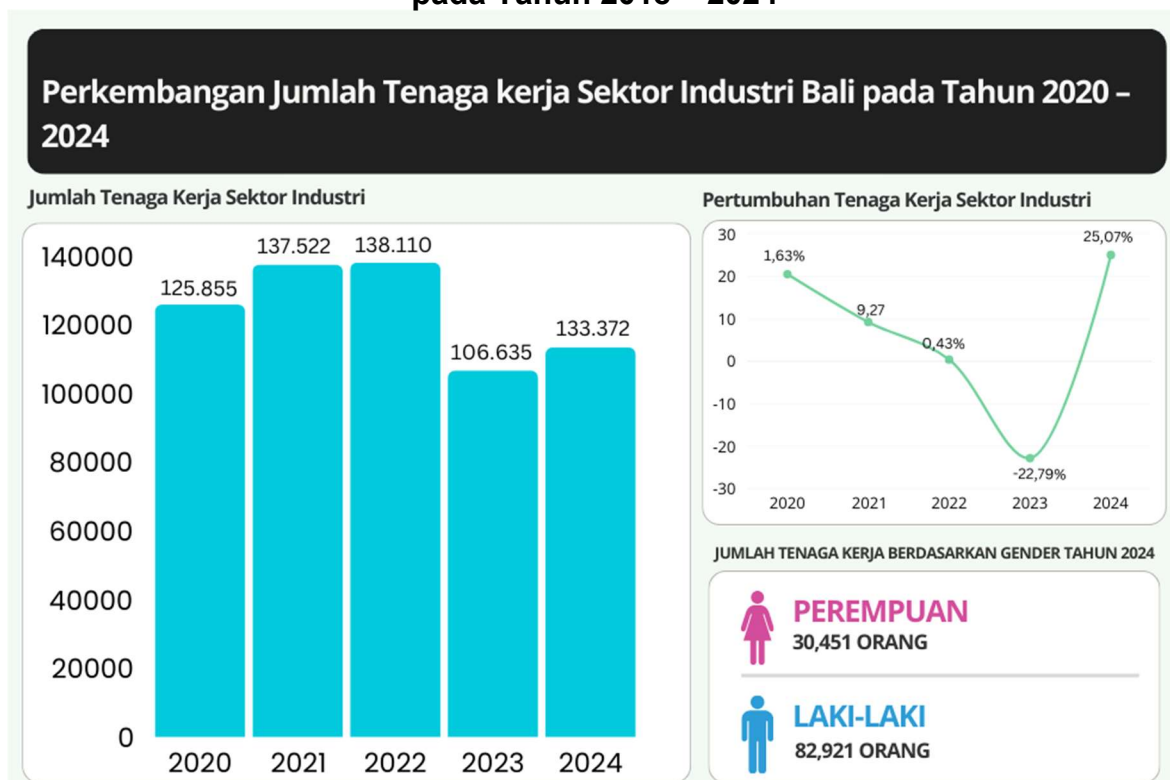
b. Perkembangan Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Bali Pada Tahun 2020– 2024

Tenaga kerja sektor industri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dalam sektor industri guna menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Adapun perkembangan jumlah tenaga kerja sektor industri di Bali dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 untuk



semua skala industri baik industri kecil hingga industri menengah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Bali tahun 2024 sebanyak 133.372 Orang (82.921 Pria dan 30.451 Wanita) capaian ini meningkat dibandingkan dari tahun 2023 sebanyak 106.635 orang. Perkembangan jumlah tenaga kerja sektor industri di Bali dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.14 berikut:

Gambar 3.8
Perkembangan Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Bali
pada Tahun 2018 – 2024



Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah tenaga kerja sektor industri Bali mengalami penurunan pada tahun 2024 karena adanya perbaikan data dari kabupaten kota data yang ditarik berdasarkan Data OSS (*Online Single Submission*) sehingga data yang masuk adalah industri yang





sudah memiliki ijin, sedangkan data tahun 2022 kebanyakan industrinya merupakan industri belum memiliki ijin.

3.2.2.3 IMPLEMENTASI PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DAN / ATAU DESTILASI KHAS BALI

Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan PERGUB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang “Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali”. Minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali terdiri atas tuak bali, brem bali, arak bali, produk artisanal. Brem atau arak bali untuk upacara keagamaan yang bertujuan membangun standardisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas produk minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali dan melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Secara teknis, dijelaskannya perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangan melalui penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali. Diantaranya pengembangan tata kelola pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali; pengembangan standardisasi pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, pendampingan pengurusan dan pemeliharaan kekayaan intelektual, dan pemberian label branding brem/arak bali pada produk-produk fermentasi dan/atau destilasi khas bali dalam produksinya masih menggunakan proses secara tradisional. Maka dari itu menindaklanjuti Peraturan Gubernur tersebut, pada tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah melakukan langkah – langkah lanjutan sebagai berikut:





- a) Sosialisasi Pergub telah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
- b) Pengembangan teknologi pengolahan arak di Kabupaten Karangasem dan Buleleng bersinergi dengan Brides Provinsi Bali dan Diskop UKM Provinsi Bali
- c) Memediasi penentuan harga patokan petani sebesar Rp.40.000 per liter
- d) Permohonan tentang keringanan tarif cukai arak Bali dalam proses pendalaman dan pembahasan yang komprehensif di Kemenkeu
- e) Fasilitasi kerjasama antara koperasi petani arak dengan industri (lokal Bali) dan distributor.

3.2.2.4 IMPLEMENTASI PERDA NO. 8 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BALI TAHUN 2020 – 2040

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam melaksanakan pembangunan industri di daerah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah dan dukungan seluruh *stakeholder* terkait serta koordinasi yang baik di tingkat pusat dan daerah, pada tahun 2020 pemerintah provinsi Bali meluncurkan PERDA NO. 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020–2040 maka dari itu menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut pada tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah melakukan langkah–langkah lanjutan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Tingkat Provinsi kepada Kabupaten/Kota





2. Pembentukan Tim Evaluasi RPIK No SK.19/03-I/HK/2021 yang akan melakukan evaluasi terhadap Kajian dan Draft Perda yang diajukan oleh Kabupaten/Kota
3. 6 Kabupaten dan 1 kota telah memiliki RPIK yaitu Denpasar dan Kabupaten Gianyar .
4. Sebanyak 2 Kabupaten masih belum RPIK yaitu klungkung, bangli
5. Kabupaten yang telah memiliki RPIK, Kabupaten Karangasem (Perda No. 14/2022 RPIK Karangasem), Kabupaten Buleleng (Perda No. 7/2023 RPIK Buleleng), Kabupaten Jembrana(Perda No. 10/2023 RPIK Jembrana), Kabupaten Badung (Perda No. 6/2023 RPIK Badung), Kota Denpasar (Perda No 6 /2024 RPIK Denpasar), Kabupaten Tabanan (Perda No. 5/2025 RPIK Tabanan),

3.2.2.5. Fasilitas Desain

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melalui UPTD Rumah Kreatif terus berkomitmen untuk mendukung perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menyediakan berbagai fasilitas yang bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi IKM dalam mendesain logo, kemasan produk, desain promosi, layanan katalog digital, serta pembuatan video promosi singkat.

Melalui program ini, Disperindag membantu IKM dalam menciptakan identitas merek yang kuat melalui desain logo yang menarik dan profesional. Selain itu, desain kemasan produk yang modern dan fungsional juga diprioritaskan untuk meningkatkan nilai jual dan daya tarik di pasar.



Tidak hanya berhenti di situ, Disperindag juga memfasilitasi pembuatan materi promosi yang kreatif dan efektif guna memperluas jangkauan pemasaran. Dengan memanfaatkan layanan katalog digital, produk IKM dapat lebih mudah ditemukan oleh konsumen, baik di pasar lokal maupun global. Ditambah lagi, video promosi singkat yang informatif dan menarik diharapkan mampu meningkatkan visibilitas produk di era digital saat ini.

Melalui berbagai fasilitas ini, Disperindag berupaya membantu IKM agar dapat bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif. Program ini tidak hanya memperkuat branding dan pemasaran produk lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Adapun jumlah desain yang dibuat oleh tenaga ahli yang ada Disperindag Provinsi Bali sebagai berikut :

Gambar 3.9
Fasilitas Desain UPTD – Rumah Kreatif
pada Tahun 2024 – 2025



3.2.2.6. Pendampingan dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual memiliki perlindungan berbasis hukum agar terproteksi dan sah dicatatkan oleh negara. Terdapatnya payung hukum yang melindungi kekayaan intelektual, yaitu dapat menghindari plagiasi dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Mendaftarkan di sentra UAD akan memudahkan untuk akreditasi dan beberapa potongan biaya dari harga yang telah ditetapkan oleh DJKI. Serta yang tidak kalah penting adalah fasilitasi proses pendaftaran merek dagang HKI melalui kuota klinik HKI Kemenperin. Berikut data pelaku usaha industri yang telah di fasilitasi dalam proses pendaftaran merek dagang (HKI) melalui kuota klinik HKI Kemenperin

Tabel 3.9
REKAP PENDAMPINGAN DAN FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
UPTD. RUMAH KREATIF DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI BALI 2023 S/D 2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Merek	168	50	57
2	Hak Cipta	96	20	0
3	Desain Industri	0	0	0
TOTAL		264	70	57

Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Tantangan kedepan yang dihadapi antara lain : perlunya inovasi yang tinggi agar produk yang dikembangkan dapat bersaing, peningkatan kualitas SDM dalam teknik produksi, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam produksi dan pemasaran, memiliki merek (HKI), dan melakukan peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing dengan produk impor.



3.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, biasanya dilakukan dengan menganalisis beberapa matrik atau indikator kunci kinerja organisasi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk melakukan perbandingan di mana kinerja telah meningkat atau menurun secara signifikan. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan tersebut. Maka untuk mengukur kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali digambarkan sebagai berikut :

TABEL 3.10
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					REALISASI				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%	9%	9%	9%	9,05 %	9,22%	9,19%	8,97%	8,69 %	8,78%
	Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,10%	6,68%	6,58%	6,62%	6,24%	6,23%

Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dengan fokus yang tajam pada penyediaan layanan yang berkualitas, organisasi ini telah berhasil mencapai sejumlah pencapaian yang signifikan. Prestasi organisasi ini juga tercermin dalam kemampuannya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan fokus yang jelas pada pencapaian hasil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah berhasil meningkatkan kualitas



layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam semua aspek operasional.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dapat dijabarkan pada table dibawah ini:

TABEL 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,78%	9,10%	-0,31%
2	Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,23%	6,15%	0.08%

Sumber: BPS Provinsi Bali

Capaian kinerja organisasi ini tidak terlepas dari komitmen kuat dari kepemimpinan dan staf, serta dari dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, mitra kerja, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Dengan terus mempertahankan fokus pada inovasi, efisiensi, dan pelayanan yang berkualitas agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat terus memperkuat kinerjanya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di masa mendatang. Kontribusi Industri terhadap PDRB pada tahun





2025 mengalami penurunan sebesar 0,01%. secara umum nilai PDRB sektor perindustrian pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2.557,42 (Milyar Rupiah) dibanding tahun 2024. hal ini disebabkan karena PDRB secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi sebesar 324.148,94 (Miliar Rupiah) namun tidak di imbangi oleh peningkatan yang signifikan dari sektor perdagangan. Hal ini disebabkan karena masyarakat selektif dalam pengeluaran keuangan untuk kebutuhan konsumtif.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Dalam proses ini, kami mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Secara keseluruhan, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, kami mengidentifikasi solusi yang sesuai untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kami guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat, digambarkan sesuai tabel berikut :

TABEL 3.12
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,05 %	8,78%	85,96%	Kontribusi industri pengolahan di Bali terlihat menurun pada 2025 tidak semata-	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ,





No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						mata karena industri itu berhenti berkembang, tetapi karena kombinasi penurunan ekspor barang, dinamika permintaan global, serta pangsa sektor lain yang tumbuh lebih cepat (terutama pariwisata dan jasa). Hal ini membuat proporsi industri pengolahan terhadap total ekonomi regional relatif turun dibandingkan tahun 2024 meskipun secara absolut outputnya mungkin masih positif atau stabil.	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal sehingga memenuhi persyaratan sertifikasi produk yang akan dipasarkan di level nasional maupun internasional
2	Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,10%	6,23%	102,13%	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan di Bali pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya terutama didorong oleh lonjakan kunjungan wisatawan yang meningkatkan permintaan ritel, pemulihan pariwisata struktural, serta peningkatan aktivitas investasi dan konsumsi rumah tangga. Tren ini didukung oleh penguatan daya beli dan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh di Bali	Meningkatkan daya saing produk industri lokal bali

3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbandingan pencapaian kinerja, anggaran, tujuan dan sasaran untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan/sasaran, serta mengukur tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta efisiensi dalam perencanaan penganggaran. Secara ringkas digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,05 %	8,78%	85,96%	19.376.085.557	17.773.718.745	91,73 %	8,27%
Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,10%	6,23%	102,13%	6.081.959.018	5.837.647.349	95,98%	4,02%

3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Analisis keberhasilan dan kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui capaian serta relasi antara indikator sasaran strategis dengan indikator capaian kegiatan dan sub kegiatan, secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8.78%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Indeks Keberdayaan Konsumen</i>	63,37	Menunjang
			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses</i>	100 %	
			☀ Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK yang Aktif	1 BPSK	
			☀ Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM yang Aktif	3 LPKSM	





Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan	100 % 100 %	Menunjang
			☼ Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barangng Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	125 Laporan	
			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan	60 Sertifikat	
			Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60 Dokumen	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	1 Pasar	
			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina Jumlah Toko Swalayan yang dibina	18 Pasar 18 Toko	
			☼ Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	36 Laporan	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	persentase harga barang pokok	8,7 %	
			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	18 Kali	
			☼ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	





Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	65,73 %	Menunjang
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya	19 Pelaku Usaha	
			☀ Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	61 Pelaku Usaha	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,14	
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	17760 Dokumen	
			☀ Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	17760 Dokumen	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	31 %	
			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal Bali	35 Pelaku Usaha	
			☀ Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	5 Laporan	
Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,23%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	7,5 %	Menunjang
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	7,5 %	
			☀ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dokumen	





Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7
			☼ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	100 %	Menunjang
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul	100 %	
			☼Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	150 Dokumen	

Selama beberapa tahun terakhir, kinerja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah menunjukkan capaian yang baik, mencerminkan komitmen mereka dalam memajukan sektor industri dan perdagangan di provinsi bali. Melalui program-program pelatihan, bimbingan teknis, dan akses ke pasar yang lebih luas, Disperindag telah membantu para pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka.





Tabel 3.16
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
A	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	761.690.873	731.934.999	96,09%
1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	461.672.200	461.462.000	99,95%
	☀ Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000,00	456.000.000,00	100%
	☀ Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	5.672.200	5.462.000	96,29%
2	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	86.223.497	84.165.577	97,61
	☀ Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	86.223.497	84.165.577	97,61
3	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	213.795.176	186.307.422	87,14
	☀ Pengembangan Layanan Pengujian	213.795.176	186.307.422	87,14
B	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	273.029.457	271.756.661	99,53%
4	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	273.029.457	271.756.661	99,53%
	☀ Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	273.029.457	271.756.661	99,53%
C	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	13.442.800	13.120.004	97,59%
5	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	13.442.800	13.120.004	97,59%
	☀ Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	13.442.800	13.120.004	97,59%
D	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.382.011.261	5.166.093.885	95,98%
6	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5.382.011.261	5.166.093.885	95,98%
	☀ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	176.162.000	119.644.010	67,91%
	☀ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.205.849.261	5.046.449.875	96,93%
E	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	26.959.900	3.360.000	12,46%
7	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	26.959.900	3.360.000	12,46%





NO	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	26.959.900	3.360.000	12,46%
F	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	147.180.600,00	127.255.005,00	86,46%
8	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	147.180.600,00	127.255.005,00	86,46%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	147.180.600,00	127.255.005,00	86,46%
G	Program Pengembangan Ekspor	48.499.200	46.319.000	95,40%
9	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	48.499.200	46.319.000	95,50%
	☀ Peningkatan Citra Produk Ekspor	48.499.200	46.319.000	95,50%
H	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	198.569.414	195.540.289	98,47%
10	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	198.569.414	195.540.289	98,47%
	☀ Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	198.569.414	195.540.289	98,47%

Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dalam mengelola anggaran tidak hanya mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip tata laksana keuangan yang baik, tetapi juga keterbukaan dan akuntabilitas mereka kepada masyarakat. Dengan tetap mempertahankan transparansi dalam penggunaan dana publik dan terus meningkatkan efisiensi operasional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat terus menjadi teladan dalam manajemen anggaran yang baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di masa mendatang.



3.8 Aspek Keuangan

Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali didukung dengan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Peresentase (%)
5.1	BELANJA OPERASI	24.540.813.455	22.745.833.394	92,68%
5.1.01	Belanja Pegawai	14.524.042.945	13.622.608.126	93,79%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.510.770.510	8.667.225.268	91,13%
5.1.05	Belanja Hibah	506.000.000	456.000.000	90,11%
5.2	BELANJA MODAL	917.231.120	865.532.700	94,36%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	917.231.120	865.532.700	94,36%
	TOTAL	25.458.044.575	23.611.366.094	92,74%

Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mencatat capaian realisasi keuangan yang cukup baik. Dengan pendekatan yang hati-hati dan transparan, Dinas perindustrian dan perdagangan provinsi bali berhasil mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam pelaksanaan program/ kegiatan. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mengelola anggaran sebesar Rp.25.458.044.575 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.23.611.366.094 dengan realisasi fisik 100% dari target 100%.





BAB IV PENUTUP





BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak, Hasil laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali tahun 2025 dapat disimpulkan dari analisis ke 2 (dua) sasaran yaitu :

- a. **Sasaran 1** : Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, dengan indikator kinerja: Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan target 9,05 % dengan realisasi 8,78%
- b. **Sasaran 2** : Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB dengan indikator kinerja: Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB target sebesar 6,10% realisasi sebesar 6,23%,

Secara umum target dinas perindustrian dan perdagangan provinsi bali tercapai seluruhnya selain itu langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan kedepan yang dihadapi dapat dirumuskan dalam rencana aksi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Fasilitas sarana dan prasarana, peningkatan jaringan bisnis dan pemasaran, kelembagaan, serta peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha,





2. Meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* yaitu Pemerintah, Swasta, Akademisi dan lain-lain,

